



**SUMMARY**  
**LAPORAN**  
**KUNJUNGAN DELEGASI KOMISI I DPR RI**  
**KE NEGARA MESIR, YORDANIA, SURIAH DAN LEBANON**  
**TANGGAL 28 JUNI – 4 JULI 2010**

**I. PENDAHULUAN**

Komisi I DPR RI pada Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2009-2010 telah mengadakan kunjungan kerja luar negeri ke Negara Mesir, Yordania, Suriah dan Lebanon. Kunjungan dilaksanakan pada tanggal 28 Juni – 4 Juli 2010 dengan jumlah Delegasi terdiri dari 20 (duapuluh) Anggota Komisi I DPR RI, 2 (dua) orang Staf Komisi I dan 2 (dua) orang Penghubung Kemlu dengan DPR RI. Dalam kunjungan tersebut, Delegasi juga mengikut sertakan 4 (empat) orang Wartawan/reporter dari TV One, ANTV dan MNC (RCTI).

Dalam kunjungan tersebut, Delegasi memfokuskan kunjungan pada 2 (dua) aspek, yaitu : pelaksanaan diplomasi parlemen melalui pemberian dukungan terhadap perjuangan Bangsa Palestina dan pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Kantor Perwakilan RI di luar negeri sebagai salah satu mitra kerja Komisi I DPR RI.

Alasan perhatian kunjungan terhadap Negara Palestina di Jalur Gaza adalah memandang :

1. Komitmen Indonesia dalam mendukung proses perdamaian di Timur Tengah dan mendorong berdirinya sebuah negara Palestina yang bebas merdeka dengan ibukota di Yerrusalem Timur, sesuai dengan semangat yang terkandung dalam Resolusi DK PBB No. 242 (1967), 338 (1973), Arab Peace Initiative (2002), Peace Roadmap (2003) dan kerangka Annapolis (2007);
2. Disamping itu Indonesia mendukung pemulihan persatuan dan kesatuan nasional Palestina melalui rekonsiliasi antara faksi Fatah dan Hamas serta faksi-faksi lainnya guna meningkatkan posisi tawar Palestina dalam proses perundingan damai, demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan nasional Bangsa Palestina.
3. Indonesia akan terus melanjutkan dukungan bagi kemerdekaan Palestina termasuk melalui pembangunan kapasitas yang ditujukan untuk membantu peningkatan kesiapan Bangsa Palestina dalam mengantisipasi kemerdekaannya melalui Capacity Building Programs yang digagas oleh Indonesia melalui skema kemitraan strategis intra-kawasan Asia-Pasifik (NAASP).

Dengan latar belakang tersebut di atas, maka Komisi I DPR RI memandang perlu untuk melakukan suatu upaya diplomasi melalui "*Parliamentary Diplomacy*" dalam memberikan dukungan terhadap perjuangan Rakyat Palestina dalam merebut kemerdekaannya.

Dalam kunjungan ke Jalur Gaza, Delegasi DPR RI yang diketuai langsung oleh Ketua DPR RI telah mengadakan pertemuan dengan :

1. Tokoh Palestina H.E. Ismail Haniya
2. Anggota Parlemen Palestina yang berdomisili di Gaza yang dipimpin oleh Wakil Ketuanya H.E. Dr. Ahmed Bahar
3. Peresmian Peletakan Batu Pertama Pembangunan RSUD Al-Rayyan

Delegasi Komisi I DPR RI juga telah mengadakan pertemuan dengan antara lain

1. Pejabat Kementerian Luar Negeri Mesir
2. Sekretariat Liga Arab di Kairo
3. Anggota Parlemen dan tokoh-tokoh Palestina yang berdomisili di Yordania
4. Tokoh Palestina yang berdomisili di Damaskus Khalid Mishaal

Sedangkan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kinerja Kantor Perwakilan RI di Luar Negeri, Delegasi telah mendapatkan jawaban tertulis atas pertanyaan yang telah disampaikan Delegasi kepada KBRI Kairo, KBRI Amman, KBRI Damaskus dan KBRI Bairut mengenai Anggaran, Personalia, Sarana dan Prasarana, keberadaan WNI di luar negeri, dan perkembangan hubungan Indonesia dengan Negara Mesir, Yordania, Suriah dan Lebanon.

Dalam kesempatan kunjungan tersebut, Delegasi juga telah mengadakan kunjungan ke Pasukan Perdamaian RI di Lebanon yang tergabung dalam UNIFIL dan kunjungan delegasi dipusatkan disalah satu Satgas Konga, yaitu Markas Indobatt (Battalyon Indonesia)

## **II. HASIL KUNJUNGAN**

### **1. ISU PALESTINA**

Dalam berbagai pertemuan Delegasi dan tokoh-tokoh Palestina disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah dan Rakyat Palestina menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas kunjungan Delegasi DPR RI yang dinilai akan menguatkan perjuangan bangsa Palestina untuk meraih kemerdekaannya. Disamping itu, Pemerintah Palestina mengharapkan dukungan dan partisipasi Pemerintah dan Rakyat Indonesia terus diberikan sampai terwujudnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.
2. Dukunga Indonesia dalam berbagai bentuk seperti penggalangan dana, pengiriman relawan serta demonstrasi atau unjuk rasa memberikan pengaruh yang sangat besar berbagai bagi negara lain dalam mengambil sikap disamping menambah moral bagi rakyat Palestina yang sedang berjuang.
3. penghargaan atas empat posisi Indonesia terkait isu Palestina yang diajukan kepada Dewan Keamanan PBB baru-baru ini, yaitu : hentikan blokade atas jalur Gaza, penegasan hak pengungsi Palestina untuk kembali ke wilayah asalnya, penegasan hak bangsa Palestina untuk menjaga dan mempertahankan Mesjid Al-Aqsa dan dukungan atas tindak lanjut Laporan Richard Goldstone mengenai Pelanggaran HAM oleh Israel dalam serangan militer ke Jalur Gaza pada awal 2009.
4. Penghargaan dan penghormatan terhadap posisi dan sikap Parlemen Indonesia (DPR RI) selama ini yang berani mengeluarkan kecaman terhadap berbagai pelanggaran dan langkah-langkah provokatif Israel.

5. Pemerintah dan Rakyat Palestina tetap berharap peranan Indonesia, antara lain :
  - a. Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel;
  - b. Bangsa Indonesia tetap memberikan dukungan politik, dukungan moril maupun matriel ;
  - c. Membantu perjuangan rakyat Palestina dalam forum-forum Internasional, seperti PBB dan OKI, khususnya dalam memperjuangkan untuk mengakhiri blokade Israel di Jalur Gaza;
  - d. Berharap bantuan Bangsa Indonesia berupa beasiswa untuk anak-anak Palestina.
  - e. Menyambut baik adanya hubungan politik antara Indonesia dan Palestina baik melalui Kedutaan Palestina di Jakarta maupun melalui pertemuan-pertemuan antara tokoh-tokoh dan para pejabat kedua negara.

Sementara itu, Delegasi Indonesia menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kunjungan Delegasi DPR RI ke Jalur Gaza mewakili 240 juta rakyat Indonesia dan mewakili 9 (sembilan) Fraksi yang ada di Parlemen untuk memberikan dukungan bagi perjuangan rakyat Palestina. Kunjungan DPR RI yang mewakili berbagai Partai/kelompok di Indonesia tersebut diharapkan dapat menjadi simbol persatuan yang dapat dicontoh oleh faksi-faksi pejuang kemerdekaan di Palestina.
2. Kunjungan Delegasi DPR RI merupakan kunjungan bersejarah yang dapat diartikan sebagai bentuk dukungan nyata Indonesia terhadap upaya pembebasan blokade Jalur Gaza dari Israel.
3. Kunjungan Delegasi DPR RI merupakan misi kunjungan yang meliputi misi kemanusiaan dan misi politik, untuk mendukung perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina.
4. Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan dana sebesar USD. 2 juta untuk membantu pembangunan RSUD Al-Rayyan di Gaza Utara. Bantuan ini akan diserahkan secara resmi oleh Pemerintah Indonesia dalam waktu dekat.

Dalam kunjungan ke Jalur Gaza, Delegasi juga berkesempatan melakukan peresmian dan peletakan batu pertama pembangunan RSUD Al-Rayyan. Disamping bantuan dana yang telah dialokasikan Pemerintah RI sebesar USD. 2 juta, Rakyat Indonesia juga telah mengumpulkan dana yang disalurkan melalui beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat yang akan segera disampaikan kepada Pemerintah Palestina.

Sementara itu Pihak Kemlu Mesir dan Liga Arab menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Secara praktis, sebenarnya tidak ada krisis kemanusiaan yang serius di Jalur Gaza mengingat bahwa sekalipun Gaza diblokade Israel, 60 % dari kebutuhan pokok rakyat Palestina di Jalur Gaza dapat terpenuhi dengan penyelundupan barang-barang dari Mesir melalui jaringan terowongan yang memiliki jalur utama tidak kurang dari 300 terowongan. Meskipun demikian, diakui tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi dari terowongan tersebut, seperti kebutuhan pembangunan infrastruktur;
2. Persoalan di Gaza bukan krisis kemanusiaan, melainkan krisis politik dan bahkan krisis sosial;
3. Banyak pihak yang tidak memiliki informasi yang cukup dan benar terkait status pengelolaan Pintu Rafah, sehingga menyebabkan kesalahpahaman terhadap kebijakan dan posisi Pemerintah Mesir selama ini;

4. Kunjungan Delegasi Komisi I DPR RI diharapkan akan membawa pemahaman yang lebih baik mengenai posisi Mesir dan pada gilirannya Mesir mengharapkan dukungan Indonesia terhadap posisinya yang diarahkan untuk membantu perjuangan kemerdekaan Palestina.
5. Situasi di Jalur Gaza sangat sulit, jauh dari kondisi normal. Insiden Freedom Flotilla adalah sebuah wake up call bahwa Rakyat Palestina di Jalur Gaza tidak dapat dibiarkan tanpa dukungan dan bantuan internasional. Dukungan internasional tersebut tidak sebatas bantuan kemanusiaan semata, tetapi dukungan untuk menghentikan blokade, sehingga masyarakat Jalur Gaza dapat kembali hidup normal;
6. Penyelesaian konflik Israel – Palestina sejauh ini belum menunjukkan perkembangan yang berarti. Israel terus berupaya untuk mencapai perdamaian dengan Palestina dan Dunia Arab dengan prasyaratnya sendiri, yang tidak sejalan dengan keinginan Dunia Arab mengenai solusi yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan;
7. Komitmen Presiden Obama untuk mendorong penyelesaian masalah Arab-Israel patut mendapat dukungan. Meskipun demikian, fakta menunjukkan bahwa mediasi AS melalui Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah, George Mitchell, menemui jalan buntu. Se jauh ini utusan Mitchell tidak berhasil untuk mendesak Israel untuk menghentikan pembangunan pemukiman Yahudi di Palestina. Kebuntuan tersebut juga disebabkan arogansi Israel ;
8. Upaya rekonsiliasi Fatah-Hamas juga belum menunjukkan hasil positif. Kendala utama upaya rekonsiliasi ini adalah perbedaan paradigma antara kedua pihak vis-a-vis arogansi Israel. Faksi Fatah lebih memilih bahasa perdamaian, karena menilai bahwa tidak ada kekuatan yang memadai di pihak Palestina, sedangkan Hamas lebih memilih bahasa kekuatan (*language of force*). Rancangan kesepakatan rekonsiliasi yang ditawarkan oleh Mesir juga belum diterima oleh Hamas karena dinilai kurang mengakomodir pandangan dasar mereka.
9. Mengenai kemungkinan untuk menekan Israel melalui sarana ekonomi, seperti minyak dan instrumen finansial internasional lainnya, hal tersebut dinilai juga sulit dilakukan karena sistem internasional berada di bawah kendali negara-negara Barat yang lebih memihak pada Israel.

Sementara itu kepada Kemlu Mesir dan Liga Arab, Delegasi Komisi I DPR RI menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Indonesia mendukung cita-cita dan perjuangan rakyat Palestina untuk memiliki sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Se jauh ini, faktor kedekatan ideologi dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal antara kedua bangsa telah mendorong rakyat Indonesia untuk memberikan dukungan dalam berbagai bentuk meskipun secara geografis kedua bangsa berada dalam posisi yang berjauhan;
- b. Indonesia menghargai peran kunci dan strategis Negara Mesir dalam penyelesaian masalah Palestina dan bersama masyarakat internasional lainnya, banyak menumpukan harapan pada peran Negara Mesir;
- c. Delegasi menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang mendalam atas izin dan bantuan pemerintah Mesir, sehingga Delegasi Parlemen Indonesia dapat dengan mudah masuk ke Jalur Gaza melalui Pintu Rafah;
- d. Tiga hal yang menjadi tujuan utama kunjungan Delegasi Parlemen Indonesia ke Jalur Gaza adalah untuk mendorong pencabutan blokade Israel terhadap Jalur Gaza, rekonsiliasi persatuan internal Palestina dan pembentukan Tim Pencari Fakta Internasional yang independen untuk menyelidiki insiden Mavi Marmara (*Freedom Flotilla*).

## **2. PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN**

Terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Perwakilan RI di luar negeri, Delegasi dapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dibidang Anggaran, untuk alokasi Anggaran 2010, KBRI Kairo, KBRI Amman, KBRI Damaskus dan KBRI Beirut mendapat kenaikan anggaran rata-rata diatas 10 % dan sumber penerimaan PNPB dari keempat KBRI telah disetorkan langsung ke kas negara.
2. Dibidang Personalia, keempat KBRI telah terdukung oleh home staf sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.
3. Dibidang sarana dan prasarana, KBRI Amman mengalami kendala akan keterbatasan sarana dan prasarana kerja, karena usia peralatan yang relatif sudah tua dan tidak up to date. Status kepemilikan wisma duta dan kantor KBRI Amman dan KBRI Beirut hingga saat ini masih sewa, sehingga menimbulkan permasalahan mengenai kelanjutan kontrak dan kecenderungan pemilik gedung menaikkan harga setiap pembaharuan kontrak.
4. Terkait dengan keberadaan WNI di Mesir, Yordania, Suriah dan Lebanon, permasalahan yang dihadapi antara lain :
  - a. Mahasiswa Indonesia di Kairo
    - 1) Kedatangan calon mahasiswa yang selalu terlambat yang disebabkan oleh susahny mendapatkan visa dari Kedubes Mesir di Jakarta. Hal ini disebabkan tidak jelasnya pembagian otoritas antara lembaga yang menjadi stakeholder pengurusan calon mahasiswa Al-Azhar. Kementerian Agama yang selama ini menjadi stakeholder pengurusan calon tersebut tidak lagi dilibatkan oleh Kedubes Mesir di Jakarta.
    - 2) Sebagian besar mahasiswa indonesia berasal dari kelompok ekonomi rendah, sehingga mereka mendapat persoalan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
    - 3) Gangguan keamanan, ancaman disintegrasi antar kader bangsa dimana mereka membentuk perkumpulan antar daerah.
  - b. Tenaga Kerja Indonesia, antara lain :
    - 1) Pemalsuan dokumen perjalanan
    - 2) Pihak agen tidak membayarkan gaji dan kadang-kadang memperkerjakan pada 2 majikan
    - 3) Pihak majikan tidak membayarkan gaji, menahan paspor, tidak membayar ijin tinggal

Dalam kunjungan Delegasi ke Pasukan Perdamaian UNIFIL, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Secara umum tidak terdapat kendala berarti dalam pelaksanaan tugas. Namun demikian dalam kegiatan sosial kemasyarakatan melalui CIMIC (Civil Military Coordination) dukungan dana yang cukup sangat dibutuhkan. Dana tersebut tidak digunakan untuk membangun infrastruktur di wilayah operasi, karena pembangunan infrastruktur sudah didukung oleh UNIFIL dan dari kontigen lain, seperti Spanyol yang memang memiliki dana khusus untuk CIMIC. Untuk itu diusulkan agar adanya dukungan dana bagi kegiatan sosial kemasyarakatan melalui CIMIC.
2. Perlengkapan dan peralatan secara umum cukup memadai dan dapat mendukung kegiatan operasional serta dapat bersaing dengan kontingen lain termasuk Panser "Anoa" produksi Pindad yang baru digunakan oleh Konga.
3. Masa penugasan prajurit dilakukan selama 1 tahun, tetapi semua prajurit diberi hak cuti sebanyak 2 kali dalam setahun masing-masing 20 hari. Saat ini keterlibatan TNI wanita di Konga hanya berjumlah 5 orang. Diusulkan adanya tambahan jumlah TNI wanita pada masa yang akan datang.

### **III. KESIMPULAN**

1. Secara umum seluruh program kunjungan Delegasi Komisi I DPR RI ke Jalur Gaza berjalan dengan lancar. Keberhasilan Delegasi DPR RI memasuki wilayah Jalur Gaza dapat dikatakan sebagai peristiwa monumental, mengingat bahwa sebelumnya upaya serupa hampir selalu menemui kegagalan, baik dari kalangan Pemerintah dan Parlemen maupun kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat.
2. Keberhasilan kunjungan Delegasi Komisi I DPR RI ke Jalur Gaza kali ini ditopang oleh 2 (dua) faktor penting, yaitu momentum pembukaan Pintu Rafah secara indefinitely oleh Pemerintah Mesir menyusul insiden Mavi Marmara dan dukungan Pemerintah Mesir yang telah memberikan ijin dan memfasilitasi yang patut diapresiasi, termasuk pengawalan khusus terhadap Delegasi Komisi I DPR RI dan rombongan sejak berangkat ke Jalur Gaza hingga kembali ke Kairo.
3. Kunjungan Delegasi DPR RI ke Jalur Gaza mendapat sambutan hangat dan antusias dari pihak Palestina di Jalur Gaza, baik dari pihak Pemerintah maupun masyarakat sipil. Hal ini berkaitan dengan dukungan konsistensi Indonesia selama ini terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Berdasarkan pemantauan di lapangan, memang tidak dapat dipungkiri bahwa blokade yang dilakukan Israel telah menimbulkan dampak buruk yang langsung dirasakan oleh warga Jalur Gaza, hal ini terlihat adanya dampak terhadap macetnya pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan akan alat transportasi serta barang-barang pokok lainnya.
4. Kunjungan Delegasi Komisi I DPR RI ke Kongo di UNIFIL memiliki arti strategis bagi peningkatan kualitas pengiriman misi pasukan penjaga perdamaian dunia khususnya yang tergabung dalam UNIFIL, mengingat tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengemban misi perdamaian dunia sangat besar.
5. Terkait dengan adanya permasalahan yang menyangkut WNI di luar negeri, baik dari kalangan mahasiswa dan TKI, KBRI di Kairo, Amman, dan Damaskus telah melakukan perundingan dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam upaya mencari solusi penyelesaian terhadap permasalahan yang dialami oleh Mahasiswa dan TKI di Luar Negeri.

Demikian Laporan Kunjungan Delegasi Komisi I DPR RI ke negara Mesir, Yordania, Suriah dan Lebanon. Kiranya hasil kunjungan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah dalam menentukan kebijakan dan upaya-upaya diplomasi yang dilakukan pemerintah di dunia internasional.

Jakarta, 28 Juli 2010

**DELEGASI KOMISI I DPR RI  
KETUA,**

**Ttd**

**DRS. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA**